

TESIS


Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaut Lombok Barat)

oleh :

Mukhtar
0820021005

Dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 12 Mei 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,



Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, MS.

Ketua



Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS.

Anggota

Anggota

Malang,

Universitas Brawijaya
Fakultas Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Soemarno, MS

NIP. 130 884 237

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU N0. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 12 Mei 2010

Mahasiswa,



Nama .. Mukhtar.....
NIM .. 0820021005.....
PS .. PSLP.....
PPSUB

JUDUL TESIS

Pengelolaan Program Hutan Komasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal ; (Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat)

Nama Mahasiswa : Mukhtar
NIM : 0820021005
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan

Komisi Pembimbing :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Kliwon Hidayat, M.Si
Anggota : Prof. Dr. Ir. Soemarno, M.Si

Tim Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, M.Si
Dosen Penguji 2 : Dr. Ir. Lily Agustina, M.Si

Tanggal Ujian : 12 Mei 2010
SK Penguji : 14/PMPSLP/SK PPSUB/2009

Seminar Hasil : Rabu 13 Januari 2010

RINGKASAN

Mukhtar, Program Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya, 17 Mei 2010. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal ; Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung Sesaut Lombok Barat. Komisi pembimbing, Ketua: Kliwon Hidayat, Anggota: Soemarno.

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Nusa Tenggara Barat (NTB), diujicobakan sejak tahun 1995/1996, di areal kawasan hutan lindung Sesaut seluas 25 ha, dengan penggarap sebanyak 58 orang, dengan pola *agroforestry*. Pada tahun 1998 kemudian dilakukan evaluasi oleh Departemen Kehutanan. Hasilnya, tingkat keberhasilan mencapai 93 %. Terhadap keberhasilan tersebut, dilakukan perluasan mencapai 211 Ha, sehingga total luasan areal mencapai 236 ha, dengan jumlah penggarap mencapai 1.224 kepala keluarga.

Dalam perkembangan pelaksanaan program HKm, terjadi sejumlah konflik, baik konflik vertikal antara masyarakat dengan aparat Dinas Kehutanan maupun konflik horizontal antar kelompok-kelompok tani penggarap. Menindaklanjuti konflik tersebut, pemerintah daerah melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal yang dikenal dengan istilah *awig-awig* (aturan lokal pada Suku Sasak) pada tingkat kelompok dan tingkat kawasan.

Kenyataan di lapangan, kondisi ekologis kawasan hutan lindung Sesaut mengalami penurunan. Debit Sungai Aik Nyet yang berada di kawasan hutan lindung Sesaut dalam kurun waktu enam tahun (1998-2002) telah terjadi penyusutan debit air sebesar 18,32 m³/detik. Artinya, pelibatan masyarakat melalui program HKm, bertolak belakang dengan kondisi ekologis kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami makna program HKm oleh masyarakat; (2) Memahami penerapan *Awig-awig* mengenai program HKm dan (3) memahami penerapan program HKm. Beberapa teori yang digunakan dalam menganalisa temuan penelitian antara lain teori ekologi manusia dan teori interaksional simbolik.

Metode penelitian menggunakan rancangan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data atau informan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang termasuk penggarap program HKm dan penggarap HKm non program, juga orang dari luar kawasan hutan yang dianggap relevan. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling* dan *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui analisa deskriptif menggunakan model Miles dan Huberman. Pengujian keabsahan data dan informasi, dilakukan dengan metode triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Hasil penelitian; *Pertama*, makna program HKm oleh masyarakat dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani. Akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan. Dalam kaitannya dengan fungsi konservasi, terjadi perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan Dinas Kehutanan. Masyarakat memaknai konservasi dari keseluruhan vegetasi sebagai kesatuan fungsi ekonomi dan konservasi, sehingga pemanfaatan lahan lebih didominasi oleh tanaman MPTS. Dinas

Kehutanan memaknai tanaman pohon untuk pengintegrasian fungsi konservasi guna mendukung manfaat ekonomi.

Ke dua, Revitalisasi nilai Awig-awig sebagai aturan pelaksanaan program HKm masih dipandang sebagai simbolisasi nilai lokal. Dalam implementasinya belum efektif untuk mendukung pengintegrasian fungsi konservasi dan fungsi ekonomi sesuai dengan tujuan program HKm. Dari 12 muatan aturan dalam Awig-awig kawasan, hanya tiga muatan aturan yang dijalankan dan sembilan muatan aturan belum efektif berjalan. Pelanggaran Awig-awig yang sulit ditangani terdiri dari sindikat pencurian kayu, perilaku perambahan hutan, praktek ganti rugi lahan dan penegakan komposisi tanam.

Ke tiga, Penerapan program HKm oleh masyarakat belum efektif mendukung pelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Penerapan yang dilakukan masih sebatas pada pelestarian jangka pendek. Hal itu disebabkan karena masyarakat lebih berorientasi pada pemenuhan keinginan, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan saran akademis yakni pentingnya kajian lebih lanjut dari beberapa sudut pandang antara lain (i) kesesuaian luas lahan terhadap kecukupan ekonomi rumah tangga; (ii) Kesesuaian pola tanam untuk mendukung integrasi fungsi konservasi dengan fungsi ekonomi, (iii) perumusan model penguatan kelembagaan masyarakat berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan ekologi lokal.

Saran praktis, yakni (1) *aspek tata kelola kawasan*; diperlukan inventarisasi ulang tata batas kawasan, mendorong percepatan pemberian izin resmi kepada masyarakat dan melakukan rekonstruksi ulang kawasan yang ditetapkan sebagai lahan kelola HKm; (2) *aspek tata kelola usaha*; diperlukan intervensi program pengembangan usaha produktif melalui penguatan peran perempuan serta menggeser intensifikasi produksi di dalam kawasan hutan ke intensifikasi produksi di luar kawasan hutan dan (3) *aspek tata kelola kelembagaan*; untuk kelembagaan masyarakat diperlukan program penguatan kapasitas dan dukungan program untuk penguatan Awig-awig. Bagi kelembagaan pemerintah diperlukan komitmen terutama aparat-aparat yang di lapangan untuk melakukan penegakan hukum secara adil dan tidak bermain ganda serta dukungan pengakuan formal terhadap Forum Kawasan.

SUMMARY

Mukhtar, Posgraduate Programme, Management of Environmental Resources and Development, Brawijaya University, May 17th 2010. Community Forest Management on the basis of Local Wisdom: A Case Study in The Protection Forest of Sesaot, Western Lombok. Supervisor Commision, Chairman: Kliwon Hidayat, member: Soemarno.

The Community Forest Programm (CFP) in West Nusa Tenggara has been commencing since 1995/1996 in the area of protection forest in Sesaot at size of 25 ha, which involved 58 farmers with agroforestry system. The assesment of the programm was conducted in 1998 by the National Department of Forestry. The achievement of the programm was reported to be 93 %. Based on this results, the area of the programm was developed into 236 ha with 1,224 farmers.

During the implementation of the Community Forest Programm (CFP), there was a crucial social complict in between the community groups and government as well as internal conflict within the groups. To alleviate such social problems, the local government has established the community institution on the basis of valuable local wisdom which called as Awig-Awig. The terminology of Awig-Awig refers to the local convention of indigenous Sasaknese on the level of farmer groups and on the basis of forest zone.

Field observation shows that the environmental quality of the forest has decreased significantly. This was indicated by decreasing water recharge of 18.32 m³/second within six years (1998-2002). This mean that there was no positive contribution of being community programme to the ecologically improvement of the area.

The research was aimed to: (1) evaluate comprehensively on the understanding of the local community on the Community Forest Programme (2) establish better understanding of Awig-Awig on Community Forest Management and (3) have better understanding of the Community Forest Programme implementation. Some theories have been used to analyse the research including: human ecology theory and Symbolic interactional theory.

The methods of the research was a qualitative design using a case study. The responden or key informans were people who living accros the area both as farmer being involved in the programm and non-programme farmers as well as particular people who has better understanding on the community forest programme. The informans were determined using a *snowball sampling* dan *purposive method*. Data collecting was conducted by a direct observation, in-depth interview, documentation and triangulation study. Data analysis was done with deskriptive analyse using Miles and Huberman Models. The data and information validation was tested using triangulation method and personal confirmation via deep discussion.

Results of research: First, the Community forest programm according to local farmers was translated as a chance to have land holding in the forest area to be farming system. As a results, the people tend to behave exsploitatively and economically in maximizing the land use. In relation to conservation function, there were a discripancy understanding between community groups and Forest Institution. The conservation according to the local community was translated from entire vegetation as economic objective, so, the use of land was dominated by the Multy Purposes Trees Species (MPTS) while based on the forest

institution, the tree has to be integrated to the conservation function to support economic value.

Second, The revitalisation of Awig-awig as the local convention of implementing the community forest programme is thought to be just a symbol of local value. Thus, the local wisdom was not effective to support the integration of conservation and economic objectives of such programme. From 12 points of convention as written on the Awig-Awig manuscript of Area Managemen, there were only three points which have been accommodated effectively by the community while the rest of nine points were not obeyed. In other words, the people tend to break the convention on the Awig-Awig. It is important to note that the convention based on Awig-Awig which were very difficult to be solved including: illegal logging syndicate, slash and burning the land, illegal property, and convention relate to vegetation composition of the land.

Third, The implementation of the community forest programme has not been effective to support sustainable forest management. The management of the programme seems to be a short term target rather than long term target. This is more likely due to the willingness orientation of the local community rather than to meet their daily needs.

Based on the results, the academic recommendation proposed for the future research are: (i) land suitability in relation to meet the sufficiency of farmers income (ii) The appropriate vegetation composition should be applied on the agroforestry system to support ecology and economic functions of the forest. (iii) Establish a strengthened model of community institution on the basis of local wisdom and local ecological knowledge.

Practical recommendation (1) Zone management aspect: reinventarisation areal zone, speed up a formal permits to community and reconstruction of the community forest area (2) Interpreneurships management; intervention programme on productive interpreneurships; development programme on productive interpreneurships through strengthening of women role and change intensification system from forest area to close nearby or outside the area (3) institution management: for community institution, the specific programme to strengthen building capacity of Awig-Awig is needed. A good government including policy commitment in particular for field staff supervision to work based on law enforcement is indispensable.